

## ABSTRAK

### PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM PERKARA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

**Muhammad Ilham Yunus**  
**NIM.82338220010**

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara peredaran sediaan farmasi jenis obat hexymer yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan, selalu mengedepankan pidana penjara daripada pidana denda sehingga tidak memberikan rasa keadilan dan tidak sesuai tujuan penjatuhan pidana. Oleh sebab itu, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan dan penerapan pidana denda sebagai alternatif dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji peraturan perundangan dan asas-asas hukum serta dihubungkan dengan teori hukum dan putusan perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*. Pengaturan pidana denda sebagai alternatif dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan UU Kesehatan yang lama yakni UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih memformulasikan sistem pidana secara kumulatif sedangkan dalam UU Kesehatan yang baru yakni, UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah memberikan ancaman pidana secara alternatif. *Kedua*. Penerapan pidana denda sebagai alternatif dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, hakim masih mengedepankan pidana penjara karena perbuatan yang dilakukan sifatnya pengulangan akan tetapi hakim juga harus mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tujuan pemidanaan menurut teori analisis ekonomi terhadap hukum yang kedepankan denda agar tidak membebankan keuangan negara serta mempertimbangkan jumlah di edarkan sedikit dan tidak ada korban jiwa maka putusan yang tepat adalah membayar denda dan tidak perlu pidana penjara.

**Kata Kunci:** Pidana Denda; Pidana Penjara; UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL FINE AS AN ALTERNATIVE TO PRISON IN CASES OF DISTRIBUTING PHARMACEUTICAL PREPARATIONS THAT DO NOT HAVE A LICENSE UNDER THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH**

**Muhammad Ilham Yunus  
(NIM.82338220010)**

The judge's decision in imposing a criminal sentence on the case of distribution of pharmaceutical preparations of the drug type hexymer which do not have a permit from the Food and Drug Monitoring Agency and the Ministry of Health, always prioritizes imprisonment rather than a fine so that it does not provide a sense of justice and does not suit the purpose of the sentence. Therefore, the problem formulation is how to regulate and apply criminal fines as an alternative in cases of distributing pharmaceutical preparations that do not have a permit based on Law No. 17 of 2023 concerning Health.

The research method used is normative juridical, namely research that focuses on examining statutory regulations and legal principles and is connected to legal theory and decisions on cases of distributing pharmaceutical preparations that do not have a permit based on Law No. 17 of 2023 concerning Health.

The research results show that First. Regulation of criminal fines as an alternative in cases of distributing pharmaceutical preparations that do not have a permit based on the old Health Law, namely Law no. 36 of 2009 concerning Health still formulates a cumulative criminal system, whereas in the new Health Law, namely, Law No. 17 of 2023 concerning Health has provided alternative criminal threats. Second. The application of fines as an alternative in cases of distributing pharmaceutical preparations that do not have a permit based on Law No. 17 of 2023 concerning Health, the judge still prioritizes imprisonment because the acts committed are repetitive in nature, but the judge must also consider the principles of fast, simple and low-cost justice as well as the objectives. Punishment according to the theory of economic analysis of the law prioritizes fines so as not to burden state finances and considering that the amount distributed is small and there are no fatalities, the correct decision is to pay the fine and there is no need for imprisonment.

Keywords: Criminal Fines; Imprisonment; Law No. 17 of 2023 concerning Health